

Katalog: 7102025.6205

ISSN 2962-7540



**ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN BARITO UTARA**

2024

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Katalog: 7102025.6205

ISSN 2962-7591

<https://barutkab.bps.go.id>

**ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN BARITO UTARA**

2024

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN BARITO UTARA 2024 VOLUME 7, 2024

Katalog : 7102025.6205
ISSN : 2962-7540
Nomor Publikasi : 62050.24036

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x+40 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Sumber Ilustrasi Infografis:
Canva.com

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.

ISSN 2962-7540

TIM PENYUSUN

**ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN BARITO UTARA 2024
Volume 7, 2024**

Pengarah : Ali Akbar Sanjaya I P, S.ST., M.Si
Penanggung Jawab : Ali Akbar Sanjaya I P, S.ST., M.Si
Penyunting : Tri Kurnia Yulianti, S.Tr.Stat
Penulis Naskah : Waluyo Wicaksono, S.ST
Pengolah Data : BPS Provinsi Kalimantan Tengah
Penata Letak : Waluyo Wicaksono, S.ST
Pembuat Infografis : Waluyo Wicaksono, S.ST

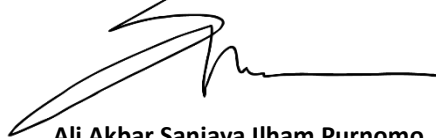
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan publikasi “Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Barito Utara 2024” ini dapat diselesaikan.

Publikasi “Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Barito Utara 2024” diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara untuk memenuhi pengguna data dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang konstruksi. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2024 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan yaitu Kota Banjarmasin. IKK tahun 2024 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Tentunya publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan agar publikasi selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Akhir kata, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Muara Teweh, November 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Barito Utara



Ali Akbar Sanjaya Ilham Purnomo



DAFTAR ISI

**ANALISIS INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN BARITO UTARA 2024
Volume 7, 2024**

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	3
1. 2. Tujuan	4
1. 3. Sumber Data	4
1. 4. Sistematika Penulisan.....	4
METODOLOGI	5
2. 1. Konsep dan Definisi	7
2. 2. Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2024.....	14
2. 3. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi	15
2. 4. Indeks Kemahalan Konstruksi 2023.....	17
ANALISIS	19
3. 1. Profil Barito Utara.....	21
3. 2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	23
PENUTUP	27
4. 1. Kesimpulan	29
4. 2. Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2024.. 37
- Lampiran 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2024..... 39
- Lampiran 3. Jarak Ibukota Kabupaten Kota Ke Ibukota Provinsi..... 40

<https://barutkab.bps.go.id>



1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

IKK merupakan komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU)

SUMBER DATA

1. Survei Harga Kemahalan Konstruksi
2. Bill Of Quantity (BoQ)
3. Buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan
4. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah



PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otodas) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otoda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)



menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

1. 2. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemahalan konstruksi kabupaten Barito Utara menggunakan angka Indeks Kemahalan Konstruksi dibandingkan juga dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah.

1. 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), *Bill of Quantity* (BoQ), Buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Realisasi Keuangan Pemerintahan Daerah 2023 (K2).

1. 4. Sistematika Penulisan

Materi dalam buku ini terbagi menjadi empat bab. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data, sistematika penulisan. Bab II Metodologi berisi tentang konsep dan definisi dan metode penghitungan IKK. Bab III Pembahasan berisi profil Kabupaten Barito Utara dan Analisis Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Barito Utara. Terakhir, Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran.



2.METODOLOGI

Kota Acuan:

Kota Acuan pada penghitungan IKK 2024 adalah **Kota Banjarmasin**



Pemilihan Kota Acuan Berdasarkan pada wilayah yang **memiliki Nilai Indeks Rata-Rata Nasional** dengan mempertimbangkan Kelengkapan Sumber Data

METODOLOGI

2. 1. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

1. Harga perdagangan besar (HPB), Pedagang Besar, Pedagang Campuran, dan Grosir

Harga perdagangan besar (HPB) adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang. HPB bahan bangunan/konstruksi adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/*distributor/supplier* bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut. Pedagang Besar (PB) adalah pedagang/*distributor* yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar. Pedagang campuran adalah pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. *Party/grosir* atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relative mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.



2. Kegiatan Konstruksi

Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Berdasarkan KBLI 2005 yang disusun Badan Pusat Statistik yang merupakan revisi KBLI 2000, secara umum jenis bangunan konstruksi dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal mencakup rumah dan gedung yang digunakan untuk tempat tinggal oleh rumah tangga. Bangunan bukan tempat tinggal meliputi hotel, sekolah, rumah sakit, pusat pertokoan, perkantoran dan pusat perdagangan, industri atau pabrik, bangunan perdagangan, bangunan tempat pemeliharaan hewan, ternak dan unggas, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung kesenian dan olahraga serta bangunan bukan tempat tinggal lainnya.
- b. Prasarana Pertanian meliputi pembuatan kolam pemeliharaan ikan, pintu pengendali air, bagan, percontakan tanah sawah, pembukaan hutan, irigasi, dan sejenisnya.
- c. Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, mencakup pembuatan sarana jalan dan jembatan untuk angkutan jalan raya maupun kereta api,



pelabuhan laut dan udara, dermaga, landasan pesawat terbang, tempat parkir, trotoar dan sejenisnya.

- d. Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi Mencakup Bangunan Pengolahan Penyaluran dan Penampungan Air Bersih/Air Limbah/Drainase, Bangunan Pengolahan/Penyaluran dan Penampungan Barang Migas, Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air tanah, Instalasi Listrik Bangunan Sipil, Instalasi Navigasi Laut dan Sungai, Instalasi Meteorologi dan Geofisika, Instalasi Navigasi Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya, Instalasi Telekomunikasi.
- e. Bangunan Lainnya Mencakup Bangunan Terowongan, Bangunan Sipil Lainnya, Pemasangan Perancah, Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefab dan Pemasangan Kerangka Baja, Pengerukan, Konstruksi Khusus Lainnya, Instalasi Jaringan Pipa, Instalasi Bangunan Sipil Lainnya, Dekorasi Eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Berdasarkan asas keterbandingan penghitungan IKK, bahwa untuk setiap daerah harus mempunyai bobot nilai di setiap jenis bangunan sedangkan pada kenyataannya tidak setiap kabupaten/kota



memiliki kelima jenis bangunan tersebut, maka dalam penghitungan IKK jenis bangunan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, terdiri dari:
 - Kontruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
 - Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal, stasiun dan bangunan monumental.
- 2) Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan terdiri dari:
 - Bangunan jalan, jembatan dan landasan meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan dan jembatan kereta.
 - Bangunan dermaga meliputi: pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
- 3) Bangunan lainnya terdiri dari:
 - Bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman.
 - Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi:
 - Bangunan pengairan diantaranya: pembangunan waduk (*reservoir*) bendung,



- embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib dan viaduk.
- Bangunan tempat proses hasil pertanian, diantaranya bangunan penggilingan
- dan bangunan pengeringan.
- Bangunan elektrikal meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
- Konstruksi telekomunikasi udara meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi
- dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antenna.
- Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- Konstruksi sentral telekomunikasi meliputi: bangunan sentral telepon/telegraph, konstruksi bangunan menara pemancar dan bangunan stasiun kecil.
- Instalasi air meliputi instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
- Instalasi listrik meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- Instalasi gas meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- Instalasi listrik jalan.

- Instalasi jaringan pipa: jaringan pipa gas, jaringan air dan jaringan minyak.
- Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, minggu, atau bulan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah satu unit/hari.
- Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

3. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.



4. Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

5. Paket Komoditas

Paket komoditas adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional. Kualitas provinsi adalah kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.

Penyusunan paket komoditas ini didasarkan pada asas *comparability* (keterbandingan), *representativeness* (keterwakilan) dan *trade off comparability vs representativeness*. Tahapan pemilihan paket komoditas adalah sebagai berikut:

- a. Memilih barang dan jasa yang nilainya dominan atau banyak digunakan pada sektor konstruksi dengan koreksi *proxy* kesulitan geografis;

- b. Kualitas barang ditentukan berdasarkan data harga yang dominan;
- c. Jika terdapat kesamaan dominasi kualitas barang, maka dilihat koefisien variasi masing-masing kualitas barang tersebut;
- d. Semakin kecil koefisien variasi kualitas barang, maka semakin kecil perbedaan harganya (homogen).

Kemudian setelah didapatkan paket komoditas, maka dibutuhkan pula diagram timbang kelompok jenis bangunan. Diagram timbang ini disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan dan jasanya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas (m^2) menurut kelompok jenis bangunan/konstruksi.

2. 2. Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2024

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan Indeks Kemahalan Konstruksi adalah Survei Harga Kemahalan Konstruksi. Survei ini dilakukan secara triwulan yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahunnya. Untuk penghitungan IKK 2024, data yang diambil adalah data dari Survei Kemahalan Konstruksi Juli 2023, Oktober 2023, Januari 2024, dan April 2024.

Kuesioner pada Survei Harga Kemahalan Konstruksi adalah tentang harga barang konstruksi dan biaya upah tukang. Jenis barang yang ditanyakan harganya adalah tanah urug, pasir, batu pondasi, batu bata, batako, bata ringan, batu split, seng gelombang, paku, semen, besi beton, bak mandi fiber, kloset, seng plat, pipa pvc, kayu balok, kayu papan, kayu lapis/triplek, cat emulsi, cat minyak, tegel/keramik, genteng/atap, kaca, aspal, *gypsum*, kabel, bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II, mesin pompa air, rangka atap baja, aluminium, tangki air fiber, lampu, MCB, *excavator*, *buldozer*, *loader*, *tandem/vibrating roller*, *dump truck*, motor *grader*, *asphalt finisher*, *generator*



set. Jenis barang ini dibedakan menurut kualitas barang dan ukuran satuan setempat berdasarkan panjang, lebar, dan tingginya. Selain harga barang, pada survei ini juga ditanyakan upah kepala tukang, upah tukang batu, upah tukang kayu, upah instalatir listrik, dan upah pembantu tukang.

2. 3. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila

harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity (BoQ)* satu proyek yang sudah selesai.

Penghitungan IKK 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Dengan :

NK_j = Nilai Komponen ke-j

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

2. Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity (PPP)* sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy (CPD)*. Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

$$PPP (Purchasing Power Parity)_{(i)} = \exp(\alpha_i)$$

Dengan:

NK_j = Nilai Komponen ke-j

C_i = dummy kabupaten/kota ke-i



P_j = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan bangunan

α_i dan β_j = Koefisien regresi

3. Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{bangunan}(i)} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{\text{sistem}(i)} \right)^{w2(i)}$$

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

4. Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{proyek}(i)} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{\text{bangunan}(i)} \right)^{1/n}$$

n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek

5. Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{\text{kab/kota}} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{\text{proyek}(i)} \right)^{w1} \cdot 100$$

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

2. 4. Indeks Kemahalan Konstruksi 2023

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya.



Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2024 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2023.

IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2023, Oktober 2023, Januari 2024, dan April 2024. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2023 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Tahun 2024, kota acuan yang digunakan adalah Kota Banjarmasin. Kota acuan sebelumnya yaitu Kota Makassar pada tahun 2021-2023, Kota Semarang pada tahun 2018-2020 dan Kota Surabaya pada tahun 2015-2017. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.



3. PEMBAHASAN

Semakin Tinggi Nilai IKK
suatu daerah, maka biaya yang
diperlukan untuk membuat
Bangunan Juga Semakin Besar

IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah

01 Kotawaringin Barat = 106,99

02 Kotawaringin Timur = 105,91

03 Kapuas = 102,29

04 Barito Selatan = 103,59

05 **Barito Utara = 104,95**

06 Sukamara = 111,64

07 Lamandau = 111,64

08 Seruyan = 108,01

09 Katingan = 102,48

10 Pulang Pisau = 102,20

11 Gunung Mas = 112,63

12 Barito Timur = 102,86

13 Murung Raya = 116,04

71 Palangka Raya = 101,91

ANALISIS

3. 1. Profil Barito Utara

Secara astronomis, Kabupaten Barito Utara terletak pada posisi $114^{\circ}27'3,32''$ - $115^{\circ} 50'47''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}49'00''$ Lintang Utara - $1^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan. Pada umumnya Kabupaten Barito Utara dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2 persen terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu Kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km^2 (2 persen). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15 persen tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 km^2 (21,5 persen). Sungai yang berada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Selatan dengan panjang sungai lebih kurang 900 km dan lebar rata-rata 650 m dengan kedalaman rata-rata 8 m yang bermuara di Laut Jawa. Di Kabupaten Barito Utara terdapat juga danau yang berada di sekitar Desa Butong.

Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-400 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada kiri kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku

dan batu-batuan lainnya. Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu :

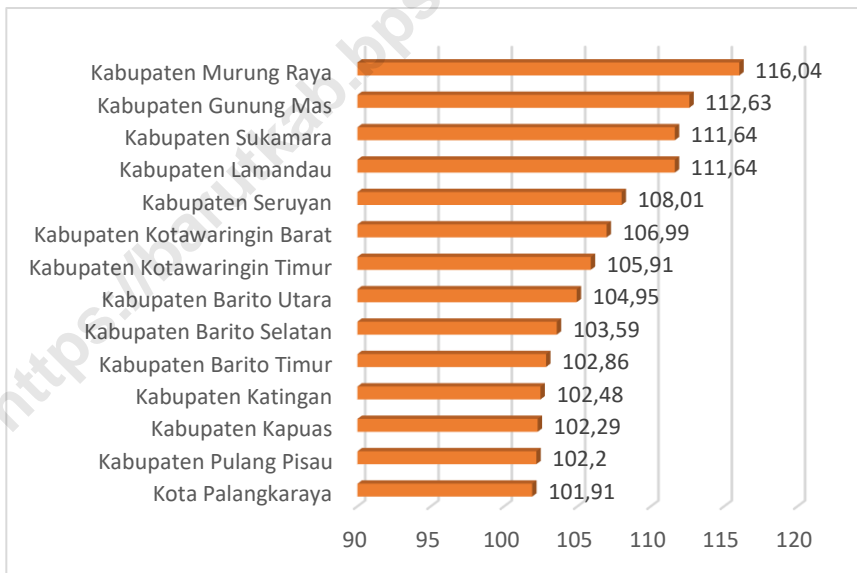
- Aluvial terdapat di aliran sungai
- Regosol, terdapat menyebar di bagian selatan wilayah Kabupaten Barito Utara
- Podsolik, merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku, terdapat pada wilayah yang berbukit
- Kambisol
- Okisol (Laterik) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan medan bergelombang dan berbukit.

Kabupaten Barito Utara sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Barito Selatan dan Propinsi Kalimantan Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Luas wilayah Kabupaten Barito Utara lebih kurang 8.300 km², terdiri dari 9 kecamatan meliputi 93 desa dan 10 kelurahan. Bagian wilayah dengan kemiringan 15-40 persen tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5 persen) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40 persen seluas 2.075 km² (25 persen). Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sebanyak 160.605, yang terdiri atas 83.228 laki-laki dan 77.377 perempuan (Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2035 (Pertengahan tahun/Juni)).



3. 2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap Tingkat Kemahalan Konstruksi rata-rata Nasional, maka IKK dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melihat tingkat kesulitan geografis serta lancar atau tidaknya kegiatan distribusi suatu bahan/komoditi bangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi IKK suatu daerah maka biaya yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan semakin besar, dalam arti distribusi bahan bangunan/konstruksi di daerah sebut lebih sulit.

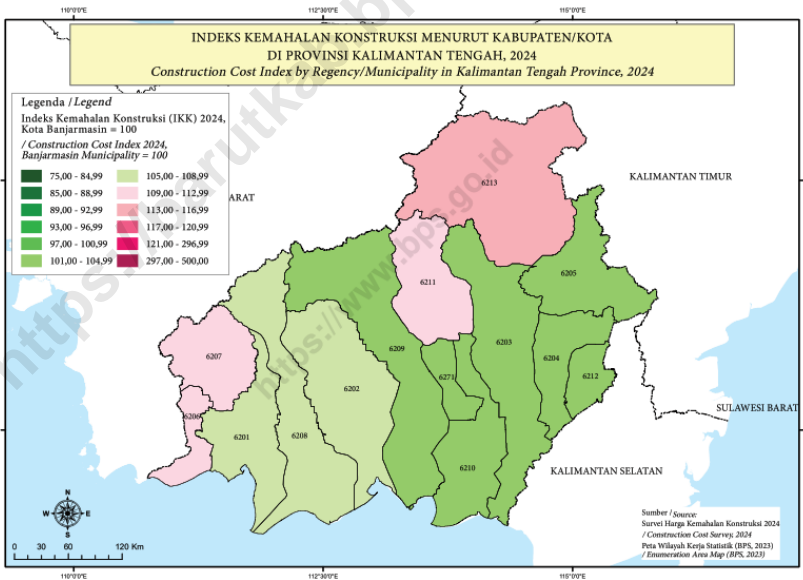


Sumber : Publikasi BPS RI. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Gambar 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 adalah 106,56 berada pada urutan tertinggi ke 21 dibandingkan 38 provinsi lainnya di Indonesia. Nilai IKK yang diatas 100 menunjukkan tingkat kemahalan konstruksi provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemahalan kota acuan yaitu kota Banjarmasin, artinya kebutuhan untuk biaya konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) pada tahun 2024 didapatkan angka-angka untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



Sumber : Publikasi BPS RI. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Gambar 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2024



Pada 2024 IKK Barito Utara 104,95 yang menempatkan Kabupaten Barito Utara tertinggi ke-8 di Provinsi Kalimantan Tengah. Indeks Kemahalan Konstruksi ini juga berkaitan dengan jarak ibukota kabupaten/kota ke ibukota provinsi terutama daerah yang tidak menggunakan sumber konstruksi dari provinsi lain. Kabupaten Barito Utara dengan jarak 326 km berada pada urutan ke-6 ibukota kabupaten terjauh dari ibukota provinsi (lihat Lampiran 3). Jika dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya, IKK Kabupaten Barito Utara lebih rendah dari Kabupaten Murung Raya dan lebih tinggi dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Sumber konstruksi yang berupa barang pabrikan kabupaten-kabupaten ini yang paling besar adalah dari Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan lebih mudah mengakses bahan untuk konstruksi karena jaraknya yang lebih dekat ke Banjarmasin. Kabupaten Murung Raya memiliki IKK tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah karena jarak kabupaten yang jauh, luas wilayah yang sangat besar, dan topologi wilayah yang sulit.

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, 2024

No (1)	Kode (2)	Kabupaten (3)	IKK (4)
1	6204	Kab Barito Selatan	103,59
2	6205	Kab Barito Utara	104,95
3	6212	Kab Barito Timur	102,86
4	6213	Kab Murung Raya	116,04

Sumber : Publikasi BPS RI. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

Bahan-bahan konstruksi di Barito Utara yang bersifat pabrikan diambil dari Kota Banjarmasin dan dari Kota Banjarmasin juga sumbernya adalah dari

Pulau Jawa, sehingga sampai di Kabupaten Barito Utara barang konstruksi yang bersifat pabrikan relatif mahal. Untuk bahan konstruksi natural, kabupaten Barito Utara sendiri menghasilkan seperti tanah urug, pasir, batu split, batu belah sehingga harga bahan konstruksi natural tersebut relatif murah.

Penyusun indeks kemahalan konstruksi adalah upah konstruksi, yaitu upah kepala tukang, upah tukang batu, upah tukang kayu, upah instalatir listrik, dan upah pembantu tukang. Menurut 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2024, upah minimum kabupaten Barito Utara tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.662.312,14. Setelah Barito Utara, kabupaten berikutnya dengan upah minimum tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Seruyan, Barito Selatan, Murung Raya.



KESIMPULAN



DAN



SARAN

<http://barunrab.blogspot.go.id>

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2024 merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan yaitu Kota Banjarmasin. IKK tahun 2024 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.
2. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah 104,95 yang menempatkan Barito Utara tertinggi ke-8 di Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya, IKK Kabupaten Barito Utara lebih rendah dari Kabupaten Murung Raya, tetapi lebih tinggi dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.

4. 2. Saran

1. Indeks Kemahalan Konstruksi sebagai gambaran wilayah sulit bisa digunakan sebagai dasar kebijakan untuk selanjutnya, khususnya dalam bidang konstruksi.
2. Mengingat pentingnya data Indeks Kemahalan Konstruksi, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara bisa ikut mendukung kelancaran survei, yaitu dengan memberikan data Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah dan BoQ *ter-update* 2024.





DAFTAR PUSTAKA

<https://barutkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016 *Pedoman Pembuatan Publikasi BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2024. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2024. *Kabupaten Barito Utara Dalam Angka Tahun 2024*. Muara Teweh: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2024. *Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2024*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2024





LAMPIRAN

<https://barutkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Menurut Provinsi di Indonesia, 2024

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,61
2	1200	Sumatera Utara	97,45
3	1300	Sumatera Barat	93,08
4	1400	Riau	96,10
5	1500	Jambi	95,32
6	1600	Sumatera Selatan	90,62
7	1700	Bengkulu	94,20
8	1800	Lampung	89,12
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	105,37
10	2100	Kepulauan Riau	111,94
11	3100	DKI Jakarta	114,79
12	3200	Jawa Barat	105,30
13	3300	Jawa Tengah	102,08
14	3400	D.I. Yogyakarta	104,88
15	3500	Jawa Timur	96,29
16	3600	Banten	94,18
17	5100	Bali	107,46
18	5200	Nusa Tenggara Barat	104,09
19	5300	Nusa Tenggara Timur	92,42
20	6100	Kalimantan Barat	107,34
21	6200	Kalimantan Tengah	106,56
22	6300	Kalimantan Selatan	100,70
23	6400	Kalimantan Timur	118,30
24	65	Kalimantan Utara	107,52
25	7100	Sulawesi Utara	100,77
26	7200	Sulawesi Tengah	91,82
27	7300	Sulawesi Selatan	95,91
28	7400	Sulawesi Tenggara	94,71
29	7500	Gorontalo	96,51

Lanjutan Lampiran 1

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
30	7600	Sulawesi Barat	91,63
31	8100	Maluku	106,52
32	8200	Maluku Utara	114,09
33	9100	Papua Barat	124,71
34	9200	Papua Barat Daya	122,21
35	9400	Papua	134,96
36	9500	Papua Selatan	142,98
37	9600	Papua Tengah	209,28
38	9700	Papua Pegunungan	249,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2024



Lampiran 2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

No (1)	Kode (2)	Kabupaten (3)	IKK (4)
1	6201	Kab Kotawaringin Barat	106,99
2	6202	Kab Kotawaringin Timur	105,91
3	6203	Kab Kapuas	102,29
4	6204	Kab Barito Selatan	103,59
5	6205	Kab Barito Utara	104,95
6	6206	Kab Sukamara	111,64
7	6207	Kab Lamandau	111,64
8	6208	Kab Seruyan	108,01
9	6209	Kab Katingan	102,48
10	6210	Kab Pulang Pisau	102,20
11	6211	Kab Gunung Mas	112,63
12	6212	Kab Barito Timur	102,86
13	6213	Kab Murung Raya	116,04
14	6271	Kota Palangka Raya	101,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2024

Lampiran 3. Jarak Ibukota Kabupaten/Kota Ke Ibukota Provinsi di Kalimantan Tengah, 2024

No	Kode	Kabupaten	Jarak (km)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	6201	Kab Kotawaringin Barat	449
2	6202	Kab Kotawaringin Timur	227
3	6203	Kab Kapuas	142
4	6204	Kab Barito Selatan	183
5	6205	Kab Barito Utara	326
6	6206	Kab Sukamara	686
7	6207	Kab Lamandau	559
8	6208	Kab Seruyan	457
9	6209	Kab Katingan	88
10	6210	Kab Pulang Pisau	98
11	6211	Kab Gunung Mas	180
12	6212	Kab Barito Timur	276
13	6213	Kab Murung Raya	411
14	6271	Kota Palangka Raya	-

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
Diolah oleh: BPS Provinsi Kalimantan Tengah



ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jalan Ahmad Yani No. 143 Muara Teweh 73811 Barito Utara
Homepage: <https://barutkab.bps.go.id>, E-mail: bps6205@bps.go.id
Pelayanan Statistik Terpadu: 0821-5740-9997

ISSN 2962-7540



9 772962 754000